



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SENO SAMODRO.

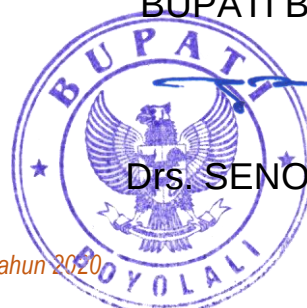
Jabatan : Bupati Boyolali.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Boyolali, 28 September 2020

BUPATI BOYOLALI,


Drs. SENO SAMODRO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,2 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.402.500.165.952 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	1013 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.414.322 m2	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,15 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (<i>green economy</i>)	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	18 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	74,72 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	3.500 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	7.740 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	9,26 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	90 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	14,05 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	79,98 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	88,09 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	95 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersediaan kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,038 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	8 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	4 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	74 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	12,66 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokuman	BP3D
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokuman	BP3D
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokuman	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70 skor	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36 Prosentase Peningkatan PAD	10,50 %	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	26 temuan/ rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5 dokuman	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	67 skor	SETDA
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	82,5 %	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	76 %	SETDA
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	79,75 skor	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52 Persentase fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	80,50 skor	SETDA
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	8 Media	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	85 %	BP3D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS
		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	55 %	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	4,4 %	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	69 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	85,71 %	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	90 %	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	95 %	SATPOL PP
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	98,78 %	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82 %	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	88,37 %	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	90 %	BPBD
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	77 %	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	37,77 %	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74 Rasio rumah layak huni	88 %	DPKP
		75 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	2,2 Ha	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	84 %	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	80 %	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,4 %	DP2KBP3A
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	75,90 %	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	21 %	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	78 %	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	31 desa	DP2KBP3A
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89 Posyandu aktif	1473 unit	DISPERMASDES
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	84 %	DISPERMASDES
		91 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	221 lembaga	DISPERMASDES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
12.	Meningkatnya Derajat kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	19 kasus	DINKES
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	10,5 per 1000	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	90 %	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	95 %	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	39,6 %	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98 %	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	45 %	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	45 %	DINKES
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	48 per 100.000	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	1,7 % dari jumlah penderita	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil	40 %	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 80 %	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50 %	DINKES
		108 Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	8 puskesmas	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	17,24 %	DINKES
		116 Rasio dokter	16,4 %	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	5,4 %	DINKES
		118 Rasio perawat	97,6 %	DINKES
		119 Rasio bidan	58 %	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	80 %	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	106 desa	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	74 %	DINKES
		123 Cakupan Desa STBM	200 desa	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	99,85 %	RSUD PANDAN ARANG
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	83,25 %	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	90 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	80,93 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	102,00 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	98,40 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	86,75 %	DISDIKBUD
		131 APM SMP	73,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,20 %	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,25 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,61 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,40 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	57,16 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	68,44 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	20,00 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	20,00 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,21 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	93,75 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	83,75 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	408 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	1 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9432 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	90 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	83 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.189.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Ekspor bersih perdagangan	158.016 US \$	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,25 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	295.855 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	137.767 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.864 ton	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	124.872 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	114.466 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	31.218 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.667 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.170 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	365 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	146 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.307 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	4.984,79 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	34.520 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	23,09 ton	DISPERTAN
		167 - Atsiri	57,13 Kuintal	DISPERTAN
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25,09 %	DKP
		169 Meningkatnya Cadangan Pangan	100 %	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	91 skor	DKP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	32.002 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.400,00 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	47.851,00 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	318.381,00 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	89.275 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	88.635 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	140.471 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	71 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah	92 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	51 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisata	450.335 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatkan PAD bidang Pariwisata.	1.457.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	98 %	DISDIKBUD

No	Program	Anggaran Pergeseran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp)	Ket	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	421.090.000	418.700.000	APBD dan DID	DPMPTSP
2	Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	-	-		DPMPTSP
3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.560.964.000	7.918.164.000		DLH
4	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	179.239.000	186.289.000		DLH
5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	9.700.000	315.700.000		DLH
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	14.625.000	14.625.000		DLH
7	Peningkatan Pengendalian Polusi	92.365.000	288.365.000		DLH
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	4.050.332.000	5.254.332.000		DLH
9	Pengelolaan Areal Pemakaman	5.000.000	5.000.000		DLH
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan	8.693.623.000	35.185.393.999	DAK, Bankeu, dan APBD	DPUPR
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.495.545.000	1.695.545.000		DPUPR
12	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	24.750.000	424.750.000		DPUPR
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.443.769.000	22.242.761.350	DAK, Bankeu, dan APBD	DPUPR
14	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	6.400.570.000	9.174.570.650		DPUPR
15	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	3.414.095.000	5.176.595.000		DPUPR
16	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	22.499.702.000	22.549.702.000		DPUPR
17	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	855.677.000	855.677.000		DPUPR
18	Pengawasan Jasa Konstruksi	203.605.000	228.605.000		DPUPR
19	Perencanaan Tata Ruang	403.584.000	553.584.000		DPUPR
20	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	49.775.000	49.775.000		DPUPR
21	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	139.412.000	179.412.000		Dishub
22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	92.700.000	67.700.000		Dishub
23	Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	-		Dishub

24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	417.500.000	417.500.000		Dishub
25	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.502.105.000	1.552.105.000		Dishub
26	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	7.000.002.000	7.104.402.000		Dishub
27	Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	5.074.945.050	5.124.945.050		Dishub
28	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	195.505.000	179.305.000		Disporapar
29	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	79.400.000	97.880.000		Disporapar
30	Pengembangan Destinasi Pariwisata	668.275.000	1.957.377.000	APBD dan DAK	Disporapar
31	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	45.039.000	33.039.000		Disporapar
32	Pengembangan Kemitraan	111.050.000	111.050.000	APBD dan DAK	Disporapar
33	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	308.075.000	308.075.000		Disporapar
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	184.880.000	424.880.000		Disporapar
35	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	40.750.000	42.250.000		Dinas Arpus
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	3.000.000	3.000.000		Dinas Arpus
37	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	-		Dinas Arpus
38	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	269.623.000	27.600.000	DAK	Dinas Arpus
39	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	13.555.000	63.555.000		BP3D
40	Perencanaan Pembangunan Daerah	427.287.000	328.287.000		BP3D
41	Pengembangan Data/Informasi	173.540.000	149.040.000		BP3D
42	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	92.534.500	92.534.500		BP3D
43	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	170.744.000	-		BP3D
44	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	100.000.000		
45	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	-		BP3D
46	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	69.905.000	69.905.000		BP3D
47	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	-		BP3D
48	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	284.687.500	284.687.500		BP3D
49	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-		Sekretariat Daerah
50	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	52.650.000	52.650.000		Sekretariat Daerah
51	Kerjasama Pembangunan	-	78.500.000		Sekretariat Daerah
52	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	45.000.000	45.000.000		Sekretariat Daerah
53	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.017.081.000	1.015.657.000		Sekretariat Daerah
54	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-		Sekretariat Daerah
55	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	26.235.000	26.235.000		Sekretariat Daerah
56	Kerjasama informasi dengan mas media	41.000.000	41.000.000		Sekretariat Daerah
57	Penataan Peraturan Perundang-undangan	104.700.500	104.700.500		Sekretariat Daerah
58	Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-		Sekretariat Daerah
59	Pendidikan politik masyarakat	-	-		Sekretariat Daerah
60	Peningkatan Pelayanan Publik	18.000.000	-		Sekretariat Daerah
61	Perencanaan Pembangunan Daerah	34.200.000	84.200.000		Sekretariat Daerah
62	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	260.820.000	250.920.000		Sekretariat Daerah
63	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-		BKD
64	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.308.887.000	8.037.697.000		BKD

65	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	508.287.000	608.287.000		Inspektorat
66	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	140.374.000	94.974.000		Inspektorat
67	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-		BKP2D
68	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	38.894.000	38.894.000		BKP2D
70	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75.015.000	46.240.000		BKP2D
69	Pendidikan Kedinasan	23.000.000	44.125.000		BKP2D
71	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	672.564.570	827.439.000		BKP2D
72	Penataan Administrasi Kependudukan	4.453.932.000	5.245.591.000		Dispendukcapil
73	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.878.207.000	6.985.237.000		Diskominfo
74	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	192.210.000	207.210.000		Diskominfo
75	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	50.400.000	30.000.000		Diskominfo
76	Kerjasama informasi dengan mas media	2.027.534.000	2.302.934.000		Diskominfo
77	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18.085.146.940	25.710.041.940		Sekretariat DPRD
78	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	2.200.000		Kankesbangpol
79	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	132.698.000	33.285.000		Kankesbangpol
80	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	4.400.000		Kankesbangpol
81	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	-	-		Kankesbangpol
82	Pendidikan Politik Masyarakat	600.000	600.000		Kankesbangpol
83	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	984.903.000	1.104.335.500		Satpol PP
84	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	81.397.000	28.735.000		Satpol PP
85	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	461.921.000	447.620.000		Satpol PP
86	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2.400.000	2.400.000		Satpol PP
87	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	6.327.758.500	6.355.983.500		BPBD
88	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	33.300.000	199.500.000		Dinsos
89	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	578.392.000	846.782.000		Dinsos
90	Pembinaan Anak Terlantar	-	654.000.000		Dinsos
91	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	110.000.000	110.000.000		Dinsos
92	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	-	-		Dinsos
93	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.600.000	1.600.000		Dinsos
94	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	9.030.000	9.030.000	DBHCHT dan APBD	Diskopnaker
95	Pengembangan Wilayah Trasmigrasi	-	-		Diskopnaker
96	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	103.923.850	103.924.000		Diskopnaker
97	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	80.163.000	114.020.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
98	Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-		Diskopnaker
99	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.000.000	63.000.000	DAK dan APBD	Diskopnaker
100	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	40.700.000	37.550.000		Diskopnaker
101	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	30.412.000	269.000.000	DAK	Diskopnaker

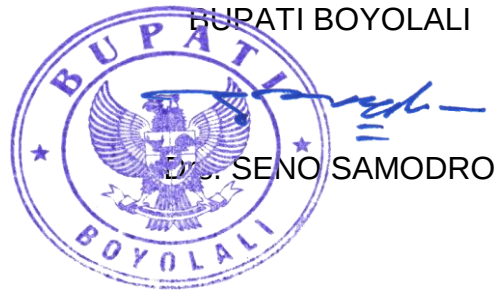
102	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	2.570.418.000	364.890.000	APBN	Diskopnaker
103	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4.158.371.522	2.570.418.000	APBN	Diskopnaker
104	Pengembangan Perumahan	212.785.000	192.246.000		DPKP
105	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (BTT/Anggaran BKD)	-	490.000.000	BTT	DPKP
106	Bansos RTLH (BTL lewat BKD)	2.782.500.000	2.782.500.000	DAK	DPKP
107	Keluarga Berencana	3.982.785.000	6.039.911.000	DAK dan APBD	DP2KBP3A
108	Keserasian Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	4.100.000	4.100.000		
109	Kesehatan Reproduksi Remaja	-	-		DP2KBP3A
110	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28.450.000	28.450.000		DP2KBP3A
111	Pelayanan Kontrasepsi	-	33.750.000		DP2KBP3A
112	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	4.200.000	4.200.000		DP2KBP3A
113	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	112.800.000	112.800.000		DP2KBP3A
114	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	3.500.000	3.500.000		DP2KBP3A
115	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.500.000	1.500.000		DP2KBP3A
116	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-		DP2KBP3A
117	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	-	-		DP2KBP3A
118	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	456.702.000	538.520.000		DP2KBP3A
119	Peningkatan Informasi Kepedudukan dan KB	40.950.000	40.950.000		DP2KBP3A
120	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-			Dispermasdes
121	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-			Dispermasdes
122	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	-	18.300.000		Dispermasdes
123	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	33.490.000	48.290.000		Dispermasdes
124	Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.565.366.500	13.659.392.500	APBD dan DAK	Dinkes
125	Upaya Kesehatan Masyarakat	12.420.833.928	18.400.342.000	APBD dan DAK	Dinkes
126	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	763.714.150	826.700.000	APBD dan DAK	Dinkes
127	Pengembangan Lingkungan Sehat	3.994.992.000	4.410.704.000	APBD dan DAK	Dinkes
128	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.400.473.200	6.786.337.000	DAK	Dinkes
129	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	11.523.951.000	11.787.001.000	DAK	Dinkes
130	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	106.827.000	175.552.000	APBD dan DAK	Dinkes
131	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	3.280.792.100	4.324.744.500	DAK	Dinkes
132	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	13.320.907.500	21.008.998.500	APBD dan Pajak Rokok	Dinkes
133	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.798.829.200	2.812.845.100	APBD dan DAK	Dinkes
134	Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	22.300.000	2.030.936.000		Dinkes
135	Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	-	-		Dinkes
136	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	43.587.399.000	48.715.856.000	APBD (In Out BLUD)	Dinkes
137	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	122.395.110.000	113.500.000.000		RSUD PA

138	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	18.175.450.182	15.335.450.182	DAK, DBHCHT, dan APBD	RSUD PA
139	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	15.588.555.000	14.925.510.003	BLUD	RSUD Simo
140	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	24.548.266.909	24.548.266.909	APBD dan DAK	RSUD Simo
141	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	5.646.985.909	5.646.985.909	DID, DAK, dan DBHCHT	RSUD Waras Wiris
142	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.774.000.000	5.774.000.000	Pajak Rokok dan APBD	RSUD Waras Wiris
143	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	11.582.500.000	14.457.270.000	BLUD	RSUD Waras Wiris
144	Pendidikan Anak Usia Dini	755.940.000	756.940.000	DAK PAUD (APBN) dan APBD	Disdikbud
145	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	107.502.232.000	119.561.573.000	BOS SD dan SMP, DAK SD, DAK SMP (APBN), Bankeu (APBD Prov) dan APBD	Disdikbud
146	Pendidikan Non Formal	1.021.487.000	1.021.487.000	DAK SKB (APBN) dan APBD	Disdikbud
147	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.618.502.000	13.302.902.000		Disdikbud
148	Manajemen Pelayanan Pendidikan	470.715.000	1.457.117.000		Disdikbud
149	Pengembangan Nilai Budaya	1.252.390.000	1.252.390.000	DBHCHT (APBN) dan APBD	Disdikbud
150	Pengelolaan Kekayaan Budaya	600.112.000	675.000.000	DAK Non Fisik BOP Museum (APBN) dan APBD	Disdikbud
151	Pengelolaan Keragaman Budaya	173.952.000	173.952.000		Disdikbud
152	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	16.950.000	15.250.000		Disdagperin
153	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	125.360.000	297.298.750		Disdagperin
154	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	33.415.000	16.330.111.000	DAK dan APBD	Disdagperin
155	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	9.360.000	9.360.000		Disdagperin
156	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	-		Disdagperin
157	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	22.107.667.000	27.172.667.000		Disdagperin
158	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	-		Disdagperin
159	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.000.820.000	982.220.000		Dispertan
160	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	64.770.000	64.770.000		Dispertan
161	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	205.412.800	205.413.000		Dispertan
162	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.210.122.500	3.997.297.000		Dispertan
163	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	9.000.000	6.452.000		Dispertan
164	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	962.147.384	965.300.000		Dispertan
165	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.186.850.000	1.186.850.000	APBN	Dispertan
166	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hasil Tanaman Pangan	4.443.902.000	4.443.902.000	APBN	Dispertan
167	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	-	-	APBN	Dispertan
168	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	162.515.000	381.215.500	DBHCHT dan APBD	DKP

169	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	152.946.000	152.946.000		Disnakkan
170	Pengembangan Budidaya Perikanan	553.400.500	1.624.795.500	DAK Kelautan Perikanan dan APBD	Disnakkan
171	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	169.925.000	166.535.500		Disnakkan
172	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	69.898.000	65.845.100		Disnakkan
173	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	27.415.000	16.500.000		Disnakkan

Boyolali, 28 September 2020

BUPATI BOYOLALI



Drs. SENO SAMODRO